PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Sudarman Nomor 1, Jemberlor, Patrang, Jember, Jawa Timur 68118
Telepon (0331) 487066, Laman jemberkab.go.id

Data kebijakan bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang ditindaklanjuti tahun 2026

No	Nama Kebijakan Tahun 2026	Tindak lanjut	Keterangan	Bagian Penanggung Jawab
1	Peningkatan kualitas perencanaan pengadaan dan ketepatan pengumuman RUP	Pendampingan OPD, verifikasi/validasi RUP, monitoring pengumuman RUP melalui SIRUP, serta sinkronisasi dengan dokumen anggaran	**Telah dilaksanakan** pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan, penginputan, verifikasi, validasi, dan pengumuman RUP melalui aplikasi SIRUP sesuai ketentuan yang berlaku dan pada Tahun 2026 persentase Pengumuman RUP sudah mencapai target 100%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2	Peningkatan kualitas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Pendampingan PPK/Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan, monitoring proses pemilihan, dan pemberian konsultasi PBJ	**Telah dilaksanakan** pendampingan dan konsultasi kepada PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, dan perangkat daerah dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
3	Penguatan digitalisasi pengadaan	Optimalisasi pemanfaatan SPSE, e-Katalog / e-purchasing, SIRUP, dan sistem digital pengadaan lainnya	**Telah dilaksanakan** fasilitasi dan pemantauan pemanfaatan SPSE dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, termasuk pelayanan helpdesk, penanganan kendala akun, serta dukungan terhadap kelancaran penggunaan aplikasi.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama Kebijakan Tahun 2026	Tindak lanjut	Keterangan	Bagian Penanggung Jawab
			Serta pembinaan, pendampingan, dan monitoring pemanfaatan Katalog Elektronik/e-Purchasing oleh Perangkat Daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi pengadaan.	
4	Implementasi kebijakan Katalog Elektronik	Monitoring indikator ITKP, penguatan kelembagaan UKPBJ, peningkatan pemanfaatan sistem pengadaan dan kompetensi SDM PBJ	**Telah dilaksanakan** monitoring dan evaluasi terhadap komponen penilaian ITKP, disertai upaya penguatan kelembagaan UKPBJ, optimalisasi sistem pengadaan elektronik, dan peningkatan kompetensi SDM PBJ	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
5	Penguatan tata kelola PBJ untuk mendukung program prioritas	Koordinasi, pendampingan dan pengendalian proses PBJ agar mendukung percepatan program prioritas pemerintah	**Telah dilaksanakan** penguatan fungsi dan tata kelola UKPBJ melalui koordinasi internal, pembinaan sumber daya manusia, penguatan proses bisnis, serta peningkatan kualitas layanan pengadaan.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
6	Penguatan kompetensi SDM PBJ	Fasilitasi sertifikasi, pelatihan/bimtek, pembinaan dan pengembangan kompetensi Pengelola PBJ	**Telah dilaksanakan** fasilitasi pengembangan kompetensi SDM PBJ melalui koordinasi, sosialisasi, bimtek, pelatihan, serta fasilitasi sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan.	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
7	Penguatan data dan informasi pengadaan	Pemutakhiran, integrasi, dan penyediaan data PBJ sebagai bahan	**Telah dilaksanakan** monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ pada Perangkat Daerah	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

No	Nama Kebijakan Tahun 2026	Tindak lanjut	Keterangan	Bagian Penanggung Jawab
		monitoring dan evaluasi	sebagai bahan identifikasi permasalahan, pengendalian pelaksanaan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan.	
8	Penguatan akuntabilitas dan pengendalian PBJ	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PBJ, pengelolaan risiko, dokumentasi eviden, serta tindak lanjut hasil evaluasi	**Telah dilaksanakan** penguatan pengendalian dan manajemen risiko Pengadaan Barang/Jasa melalui identifikasi, pemantauan, dan pengendalian risiko serta tindak lanjut atas permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan pengadaan. Selain itu, telah dilaksanakan monitoring dan pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan keterlibatan UMKM dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, serta pengumpulan, pemutakhiran, pengolahan, dan penyajian data PBJ sebagai bahan monitoring, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan kebijakan	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
9.	Penguatan pembinaan dan tata kelola BUMD dan BLUD	Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan serta	**Telah dilaksanakan** fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penguatan tata kelola BUMD, antara lain melalui pelaksanaan	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Nama Kebijakan Tahun 2026	Tindak lanjut	Keterangan	Bagian Penanggung Jawab
		pengelolaan BUMD dan BLUD	proses seleksi Dewan Pengawas BUMD Tahun 2026. Sekretariat Panitia Seleksi berkedudukan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.	
10	Pengendalian inflasi	Koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dan instansi terkait, pemantauan perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, serta fasilitasi pelaksanaan operasi pasar dan gerakan pangan murah	**Telah dilaksanakan** koordinasi dan fasilitasi upaya pengendalian inflasi daerah melalui pemantauan perkembangan harga dan pelaksanaan Operasi Pasar Murah serta Gerakan Pangan Murah di berbagai wilayah Kabupaten Jember. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan komoditas pangan	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
11	Penguatan ketahanan pangan daerah	Koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah dalam mendukung ketahanan pangan, pemutakhiran indikator ketahanan pangan, penguatan rantai pasok serta koordinasi dalam menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan	**Telah dilaksanakan** koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyesuaian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi (RB) Tematik Ketahanan Pangan Tahun 2026 bersama Bapperida dan perangkat daerah terkait. Penyesuaian mencakup pemutakhiran indikator ketahanan pangan daerah, penguatan rantai pasok dan kelembagaan petani/peternak, serta	Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

No	Nama Kebijakan Tahun 2026	Tindak lanjut	Keterangan	Bagian Penanggung Jawab
			perumusan langkah strategis dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga bahan pokok.	

Perhitungan:

Persentase Kebijakan yang Ditindaklanjuti = (Jumlah kebijakan yang telah ditindaklanjuti/Jumlah kebijakan yang harus ditindaklanjuti) x 100%

= (11/11) x 100%

= 100 %

Jadi persentase Kebijakan Bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Yang ditindaklanjuti pada tahun 2026 sebesar **100%**

Jember, 28 September 2026

Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jember

Ratno Cahyadi Sembodo
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19740827 200501 1 006